

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah di setiap penjuru wilayahnya. Sebagai negara dengan wilayah yang cukup strategis tak heran banyak perusahaan dalam dan luar negeri yang menjalankan usahanya di Indonesia. Hal ini tentu dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya di subsektor pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 37A Ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi Undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu Perusahaan.

Salah satu kendala dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak adalah tindakan perlawanan pajak oleh perusahaan yang berupaya untuk mengurangi Biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong

perusahaan untuk melakukan tindakan meminimalisir beban pajak yang disebut dengan tax avoidance, agresivitas pajak, manajemen pajak, atau perencanaan pajak.

Berbeda halnya dengan pemerintah, Perusahaan selaku Wajib Pajak menganggap pajak merupakan beban yang ditanggung oleh perusahaan. Suandy (2011) mengungkapkan bahwa bagi sebagian besar perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi penerimaan perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari subsektor pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari subsektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkannya agar dapat memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dapat melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana, 2013) dalam Nugraha dan Meiranto, 2015.

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak disebut *tax avoidance*, yaitu manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang. (Zain, 2007). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya

penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23). Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Terdapat beberapa contoh kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya di Indonesia seperti fenomena atau kasus berikut:

Fenomena pertama pada PT Kaltim Prima Coal melakukan penghindaran pajak dengan melakukan penjualan batu bara ke PT Indocoal Resource Limited menggunakan setengah dari harga jual biasanya. Selanjutnya penjualan batu bara ke luar negeri dilakukan oleh PT Indocoal Resources Limited dengan menggunakan harga jual normal PT Kaltim Prima Coal. Sehingga omset penjualan yang diterima PT Kaltim Prima Coal sangat rendah dan menyebabkan pembayaran pajak yang rendah pula. (<https://bisnis.tempo.co>).

Fenomena kedua, dalam konteks laporan *Global Witness* tahun 2019, PT Adaro memanfaatkan celah *tax avoidance* dengan menjual batu baranya ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Akibat pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Artinya penjualan dan laba yang

dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya, Memang cara itu tidak melanggar aturan perpajakan, tapi tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal. (<https://finance.detik.com>)

Berdasarkan beberapa fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) diatas, persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi disisilain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangipendapatan bagi negara. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* antara lain, profitabilitas, *leverage*, dan pengungkapan *corporate social responsibility*. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan Utami (2013) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga

kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung. Selain itu, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dengan hasil bahwa *ROA* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. (Kurniasih dan Sari, 2013).

Leverage juga merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi *DER* menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Surya, 2016).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah pengungkapan *corporate social responsibility*. Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga

disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j () merupakan rumus yang digunakan untuk mengukur indeks pengungkapan masing-masing perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah *taxavoidancenya*. Sedangkan semakin rendah tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*nya maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan *tax avoidance* (Shinta Dewi Adi Putri, 2015).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Desi Mandasari (2014), yaitu “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility terhadap *Tax Avoidance*” pada Perusahaan batubara Sub Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada waktu, perusahaan dan sampel penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan batubara sub otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

Alasan peneliti memilih perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu Alasan peneliti menggunakan Subsubsektor batubara batu bara karena memberikan kontribusi yang besar untuk penerimaan negara dalam subsektor perpajakan sehingga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kecurangan dalam pembayaran pajak yang mengakibatkan kerugian negara. Perusahaan-perusahaan batubara Indonesia dianggap memiliki keunggulan kompetitif untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan yang relatif tinggi. Oleh karenanya menarik untuk dikaji, perusahaan-perusahaan batubara Indonesia memiliki keunggulan kompetitif di pasar global, sebab Indonesia masuk kedalam jajaran produsen terbesar dunia untuk beberapa komoditas tambang. Indonesia juga dinilai sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat menjanjikan. Posisi Indonesia dalam hal potensi sumber daya komoditas batubara, mengalahkan Peru, Australia, Mexico, dan Afrika Selatan. (www.ekonomi.inilah.com).

Berdasarkan pada uraian di atas dalam penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti memilih judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan Subsubsektor Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019)”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan,
2. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal maupun ilegal.
3. Banyaknya perusahaan yang merugikan negara karena melakukan penghindaran pajak sehingga penerimaan pajak bagi negara berkurang.
4. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
5. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak dengan cara melakukan transaksi yang tidak dibebankan kedalam beban pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan fokus pembahsan agar dalam pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana profitabilitas pada batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Bagaimana *leverage* pada perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Bagaimana pengungkapan *corporate social responsibility* pada

perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

4. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
6. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
7. Seberapa besar pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
8. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pengungkapan *corporate social responsibility* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis profitabilitas pada perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk menganalisis *leverage* pada perusahaan batubara subsubsektor

batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Untuk menganalisis pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Untuk menganalisis *tax avoidance* pada perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
7. Untuk menganalisis pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
8. Untuk menganalisis besarnya profitabilitas, *leverage*, dan pengungkapan *corporate social responsibility* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Empiris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain :

- a. Bagi Penulis
 - a) Dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
 - b) Dapat mengembangkan pengetahuan, ilmu dan teori yang dimiliki penulis mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.
- b. Bagi Perusahaan
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan tentang pentingnya pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.
 - b) Penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan untuk mengetahui praktik penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga transaksi

tersebut dapat dikatakan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan sehingga dapat mengurangi celah terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*)

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). dengan objek penelitian Laporan Keuangan perusahaan batubara subsubsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019, sumber data diperoleh dari Indonesian Stock Exchange (www.idx.co.id) dan (www.sahamok.com).

1.1 Tabel Time Skedul Penelitian Skripsi

No	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Matriks	■																									
2	Bab 1	■																									
3	Bab 2						■	■	■																		
4	Bab 3								■	■	■																
5	SUP												■														
6	Bab 4																■	■									
7	Bab 5																				■	■	■				

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, HIPOTESIS DAN KERANGKA
PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi Perpajakan

2.1.1.1 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Agus Setiawan (2012:8) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan harus dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya.”

Agoes dan Estralita (2013:10) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Waluyo (2014:35) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan sebagai berikut :

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang

perundang – undangan perpajakan terdapat aturan – aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang – undang.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.1.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes dan Estralita (2013:11) adalah sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialistis, konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.”

2.1.2 Ruang Lingkup Laporan Keuangan

2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Sementara itu Menurut Irham Fahmi (2015:21) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan, hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Hery (2016:5) adalah sebagai berikut:

“Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang intinya “Tujuan laporan keuangan merupakan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

2.1.2.3 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap pada umumnya terdapat beberapa jenis, Menurut Irham Fahmi (2015:22) pada umumnya sebuah laporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca (*balance sheet*)
2. Laporan laba rugi (*income statement*)
3. Laporan perubahan modal (*statement of changes in capital*)
4. Laporan arus kas (*cash flow statement*)
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statement*)

Berdasarkan jenis-jenis laporan keuangan yang di uraian di atas bahwa ada 4 jenis laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemegang saham dan laporan arus kas yang dimana untuk menghitung dan menginterpretasikan beban pajak tangguhan dan *leverage*.

2.1.2.4 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:8) kondisi dan situasi yang tergambar pada laporan keuangan akan menjadi informasi keuangan dan selanjutnya informasi tersebut akan dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan, harus disadari oleh pihak manajer keuangan khususnya akuntan pembuat laporan keuangan bahwa ada 4 (empat) karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi.

Menurut Irham Fahmi (2014:8) keempat karakteristik tersebut adalah:

1. Dapat dipahami

Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami oleh para penggunanya. Para pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang berasal dari berbagai kalangan latar belakang pendidikan, profesi dan budaya yang berbeda-beda. Laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang sederhana, singkat, formal dan mudah dipahami. Laporan keuangan sering diharuskan menggunakan istilah-istilah ilmu keuangan atau industri yang sulit dipahami oleh orang-orang awam. Penyajian informasi tersebut tetap harus dilakukan karena sangat relevan bagi sebagian pengguna laporan keuangan.

2. Relevan

Informasi yang ada pada laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan. Agar relevan, informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prefiktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan. Suatu informasi dikatakan relevan apabila disajikan dengan memperhatikan prinsip materialitas.

3. Dapat dipercaya

Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan dengan handal dan dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara jujur. Laporan keuangan juga harus disajikan dengan prinsip kehati-hatian dan lengkap.

4. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding. Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya. Laporan keuangan yang disajikan dengan cara komparatif sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi keuangan. Agar memiliki daya banding, laporan keuangan juga harus menggunakan teknik-teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten.

2.1.3. Ruang Lingkup Pajak

2.1.3.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, dalam mardiasmo (2016:1) yaitu :

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi

(2017:1) yaitu:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan

yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Berdasarkan definisi diatas kesimpulannya pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada negara untuk pengeluaran umum dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3) yaitu:

1. “Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi Regulerend (Pengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomis serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

2.1.3.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. “Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

1. Sistem *Official Assessment*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Sistem *Self Assessment*, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Sistem *Withholding*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba yang hubungannya dengan aktivitas penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

Berikut ini adalah pengertian profitabilitas menurut beberapa para ahli, yaitu:

Menurut Dr. S. K. Singh (2016:334) menyatakan profitabilitas adalah sebagai berikut: “Profitability refers to the ability of a bussiness to earn profit. It

show the efficiency of the business. These measure the profit earning capacity of the company.”

Menurut Kasmir (2015:196) rasio profitabilitas adalah:

“Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkandari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan.

Menurut Agus Sartono (2012:122) rasio profitabilitas adalah “kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan,serta mengukur kemampuan keseluruhan manajemen secara efektif yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas penjualan maupun investasi.

2.1.4.2 Definisi Rasio Profitabilitas

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:245) rasio profitabilitas adalah:

“Profitability ratio is a ratio that measure of the degree of success or failure of a given company or division for a given period of time.” Menurut David Spiceland (2014:270) rasio profitabilitas adalah:

“Profitability ratios attempt to measure a company’s ability to earn an adequate return relative to sales or resources devoted to operations. Resources devoted to operation can be defined as total assets or only those assets provided by owners.”

Menurut Irham Fahmi (2013:135) pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.”

Menurut Hery (2016:192) menyatakan bahwa “Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya”.

Berdasarkan teori diatas maka rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan atau divisi dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari penjualan serta aktivitas bisnisnya dalam satu periode dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Rasio profitabilitas ini yang biasa digunakan sebagai bahan pertimbangan seorang investor dalam menanamkan sahamnya di suatu perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya.

2.1.4.3 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan .Tujuan dari rasio profitabilitas dari perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:197) :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal

sendiri.

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Selain itu, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan menurut

Hery (2016:192) yaitu:

1. “Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih”.

2.1.4.4 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan dalam satu periode tertentu atau beberapa periode. Subramanyam dan Wild (2010:39) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas diterapkan pada area penting dalam analisis laporan keuangan yang meliputi :

1. Tingkat pengembalian atas investasi (*return on investment*) untuk menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas

dan hutang.

2. Kerja operasi, untuk untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi.
3. Pemanfaatan aktiva (*assets utilizations*), untuk menilai efektivitas dan intensitas aktiva dalam menghasilkan penjualan disebut juga perputaran (*turn over*).

Dalam praktiknya terdapat beberapa jenis-jenis rasio profitabilitas yang digunakan yaitu:

1) Profit Margin (*profit margin on sale*)

Menurut Kasmir (2015:198) definisi profit margin adalah:

“*profit margin on sale* atau ratio *profit margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama *profit margin*.”

Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut :

a. *Gross Profit Margin* (margin laba kotor)

Menurut Kasmir (2015:199) definisi margin laba kotor adalah:

“Laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, rasio ini merupakan cara untuk menetapkan harga pokok penjualan.”

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{penjualan bersih} - \text{HPP}}{\text{Sales}}$$

Agus Sartono (2012:123), semakin tinggi profitabilitasnya berarti semakin baik, tetapi perlu diingat bahwa *gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan menurun begitu pula sebaliknya.

b. Net Profit Margin (*margin laba bersih*)

Kasmir (2015:200) mendefinisikan *net profit margin* adalah:

“Ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan, rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan.”

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning after interest and tax}}{\text{Sales}}$$

Agus Sartono (2012:123), apabila gross profit margin selama suatu periode tidak berubah sedangkan net profit margin mengalami penurunan, maka berarti bahwa biaya meningkat relative lebih besar daripada peningkatan penjualan.

2) *Return On Investment* (ROI/ROA)

Menurut Agus Sartono (2012:122) Profitabilitas adalah:

“Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri.”

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Irham Fahmi (2013:137) ROA merupakan rasio yang melihat sejauh

mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

3) *Return On Equity* (ROE)

Kasmir (2015:204) mendefinisikan Return On Equity adalah:

“hasil pengembalian ekuitas atau return onequity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri.”

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Earning after interest and tax}}{\text{Equity}}$$

4) Laba per Lembar Saham

Menurut Kasmir (2015:207) Laba per Lembar Saham adalah:

“Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.”

$$\text{Laba per lembar saham} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

Dari beberapa jenis pengukuran rasio profitabilitas di atas, maka penulis memilih Return On Investment/Return On Assets untuk menilai serta mengukur apakah perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak atau tidak. Semakin tinggi dari nilai ROA berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010 dalam Tommy, 2013).

2.1.5 Leverage

2.1.5.1 Definisi Leverage

Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi biaya yang diperlukan, baik jangka pendek maupun jangka Panjang, dana juga dibutuhkan untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha atau investasi baru. Artinya didalam perusahaan harus selalu tersedia dana dalam jumlah tertentu sehingga tersedia pada saat dibutuhkan.

Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan, maka diperlukan perhitungan rasio *leverage*.

Menurut Fahmi (2016:72), *leverage* adalah :

“*leverage* adalah mengukur seberapa perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan masuk *extreme leverage*, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.”

Menurut Khasmir (2012:151) *leverage* diartikan sebagai berikut :

“*leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya.”

Dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan utang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan masuk kedalam *extreme leverage*, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang yang layak diambil dan darimana sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Perhitungan rasio *leverage* memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini adalah beberapa tujuan dan manfaat dengan menggunakan rasio *leverage*.

Menurut Kasmir (2015:153), tujuan perusahaan menggunakan *leverage ratio* diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap

pengelolaan aktiva.

6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.
8. Tujuan lainnya.

Adapun manfaat menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2015:153) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban pada pihaklainnya
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (sepertiangsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara lain aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktivaperusahaan dibiayai oleh hutang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaanaktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur beberapabagian dari setiap rupiah modal sendiri yangdijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis beberapa dana jaminan yangsegera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri, dan;
8. Manfaat lainnya

2.1.5.3 Jenis-jenis Rasio *Leverage*

Salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan adalah rasio solvabilitas. Biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau *leverage* disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan *leverage* secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Menurut Agus Sartono (2012:121), *Debt Ratio* menunjukkan:

“Seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan yang didanai oleh seluruh krediturnya. Semakin tinggi rasio ini makasemakin besar risiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva.”

Menurut Kasmir (2015:156) *Debt Ratio* adalah:

“*Debt Ratio* merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Menurut Kasmir (2105:158) *Debt to Equity Ratio* merupakan:

“Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.”

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Modal (ekuitas)}}$$

3. *Time Interest earned Ratio*

Agus Sartono (2012:121), mendefinisikan *Time Interest earned*

Ratio adalah:

”Rasio antara sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga.”

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

4. *Fixed Charge Coverage Ratio*

Agus Sartono (2012:122) mendefinisikan *Fixed Charge Coverage*

Ratio adalah:

“Rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan sewa. Karena tidak jarang

perusahaan menyewa aktivitya dari perusahaan lising dan harus membayar angsuran tertentu.”

$$\text{Fixed Charge Coverage Ratio} = \frac{\text{EBIT} + \text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}{\text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}$$

5. Debt Service Coverage

Agus Sartono (2012:122), mendefinisikan *Debt Service Coverage*

adalah:

“Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi sama seperti leverage yang lain, hanya dengan memasukkan angsuran pokok pinjaman.”

$$\text{Debt Service Coverage} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Bunga} + \text{Sewa} + \frac{\text{Angsuran Pokok Pinjaman}}{\text{Tingkat Dalam}}}$$

Dari beberapa jenis pengukuran rasio leverage di atas, maka dalam penelitian

ini penulis menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dalam menentukan tingkat *leverage*. Karena rasio ini sering digunakan para analisis dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham.

2.1.6 Corporate Social Responsibility

2.1.6.1 Definisi Corporate Social Responsibility

Menurut Rahmawati (2012:180) *Corporate Social Responsibility* adalah:

“Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau *Corporats Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam tanggung jawab operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007

mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* adalah:

“Tanggung jawab sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

meningkatkan kualitas keidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Menurut Rusdianto (2013:7) *Corporate Social Responsibility* adalah: “Konsep dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* mengandung arti bahwa organisasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri (*selfish*). Sehingga teralienasi dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas”.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen perusahaan dalam menjalankan usahanya sambil memperhatikan kepentingan *stakeholder* guna meningkatkan taraf ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.1.6.2 Pengertian Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility

Menurut Rahmawati (2012:183) menyatakan bahwa:

“Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure, corporate social reporting, social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan”.

Menurut Dwi Kartini (2013:56), pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah :

“Cara pemberian informasi dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap *stakeholders*. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan, mempertahankan, serta meningkatkan legitimasi *stakeholders*”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan pengungkapan informasi atas kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan kepada kelompok khusus yang berkepentingan atau masyarakat secara luas.

2.1.6.3 Faktor-Faktor Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Menurut Rusdianto (2013:44) menjelaskan ada banyak hal yang membuat perusahaan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*-nya, yaitu:

1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-undang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman.
5. Pemenuhan kebutuhan informasi pada masyarakat.
6. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
7. Untuk mengukur kelompok stakeholder yang mempunyai pengaruh yang kuat.
8. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu.
9. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu.

2.1.6.4 Ruang Lingkup Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Menurut Azheri (2012:36) menyatakan ada tiga dimensi yang harus diperhatikan, sehubungan dengan ruang lingkup CSR yaitu :

1. “*Corporate Philantropy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
2. *Corporate Responsibility* adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
3. *Corporate Policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar

suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.”

2.1.6.5 Teori Yang Melandasi Corporate Social Responsibility

Menurut Lako (2011:5) terdapat lima teori yang melandasi *Corporate Social*

Responsibility yaitu:

1. “Teori *stakeholder*

Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan akan meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pasar, penjualan, serta laba. Dalam perspektif teori *stakeholder*, masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan.

2. Teori legitimasi

Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*”. Teori kontrak sosial “*social contract*” menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat di mana masyarakat memberi *cost* dan *benefits* untuk keberlanjutan suatu korporasi. Karena itu, *CSR* merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat suka rela.

3. Teori sustainabilitas korporasi

Menurut teori ini, agar bias hidup dan tumbuh secara berkelanjutan, korporasi harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan ekologi secara utuh. Pembangunan bisnis harus berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu, serta hidup dan memenuhi kebutuhannya. Dalam perspektif teori *corporate sustainability*, masyarakat dan lingkungan adalah pilar dasar dan utama yang menentukan keberhasilan bisnis suatu perusahaan sehingga harus selalu diproteksi dan diberdayakan.

4. *Political economy*

Menurut teori ini, domain ekonomi tidak dapat diisolasi dari lingkungan di mana transaksi-transaksi ekonomi dilakukan. Laporan keuangan (ekonomi) perusahaan merupakan dokumen sosial dan politik serta juga dokumen ekonomi. Karena tidak dapat diisolasi dari masyarakat dan lingkungan, perusahaan wajib memperhatikan dan melaksanakan *CSR*.

5. Teori keadilan

Menurut teori ini, dalam system kapitalis pasar bebas laba/rugi sangat tergantung pada *the unequal rewards and privileges* yang terdapat dalam laba dan kompensasi. Laba/rugi mencerminkan ketidakadilan antarpihak yang dinikmati atau diderita suatu perusahaan. Karena itu, perusahaan harus adil terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang sudah turut menanggung dampak eksternalitas perusahaan melalui program- program CSR.”

2.1.6.6 Manfaat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* memiliki fungsi strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Dengan menjalankan *Corporate Social Responsibility*, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga harus turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan jangka panjang.

Menurut Rusdianto (2013:13) terdapat manfaat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:

“Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.

1. Meningkatkan citra perusahaan.
2. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
3. Mempertahankan posisi merek perusahaan.
4. Mempertahankan sumberdaya manusia yang berkualitas.
5. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (capital).
6. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
7. Mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management)”.

Menurut Rusdianto (2013:13) menyatakan bahwa:

“Keputusan perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* secara berkelanjutan, merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program *Corporate Social Responsibility* akan menimbulkan efek lingkaran emas yang tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, melainkan juga stakeholder. Bila *Corporate Social Responsibility* mampu dijalankan secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah dan lingkungan.”

2.1.6.7 Indikator Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Global Reporting Initiative (GRI), yang merupakan panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh PBB lewat *Coalition for Environmental Economies (CERES)* dan (UNEP) pada tahun 1997. GRI merupakan organisasi non-profit yang mempromosikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. GRI menyediakan kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif bagi semua perusahaan dan organisasi yang banyak digunakan diseluruh dunia. Pedoman pengungkapan GRI terdiri dari G3, G3.1, dan G4. G3 atau yang sering dikenal dengan G 3.0 merupakan versi awal dari pedoman GRI yang terdiri dari 79 indikator dan 35 merupakan pedoman yang sering digunakan sampai saat ini. G3.1 merupakan versi pengembangan dari G3 yang didalamnya terkandung 84 indikator termasuk 79 indikator yang digunakan sebelumnya pada G3 dengan beberapa perubahan dan tambahan-tambahan lainnya yang dinilai lebih menyempurnakan pedoman GRI. G4 merupakan pedoman terbaru yang memiliki 91 indikator. (www.globalreporting.org).

Indikator-indikator dalam *GRI Standard Disclosure G4*, terdiri dari 3 komponen:

1. Indikator Kinerja Ekonomi (*Economic Performance Indicator*)
2. Indikator Kinerja Lingkungan (*Environmental PerformanceIndicator*)
3. Indikator Kinerja Sosial (*Social PerformanceIndicators*), terdiri dari 4 aspek, yaitu :
 - a. Indikator Kinerja Praktek Kerja & Kelayakan Kerja(*Labor Practices & Decent Work Performance Indicator*)

- b. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (*Human Rights Performance Indicator*)
- c. Indikator Kinerja Masyarakat (*Society Performance Indicator*)
- d. Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk (*Product Responsibility Performance Indicator*).

Tabel 2.1
Indikator Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*
Berdasarkan GRI-G4

KATEGORI	KODE	KETERANGAN
KATEGORI EKO NOMI		
-Kinerja Ekonomi radaan Pasar	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan Didistribusikan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
	EC4	Bantuan financial yang diterima dari pemerintah
	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat local di lokasi operasi yang signifikan
-Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
-Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok local di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
-Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan nerat atau volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
-Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi

-Air	EN7	Konsumsi energy diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh air
	EN10	Presentase total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
-Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung.
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung.
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan.
	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn res list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan.
-Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisis gas rumah kaca (GRC) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
-Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan Tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volumr total tumpahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel2 Lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan presentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional.
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi.
	-Produk dan Jasa	EN27

		lingkungan produk dan jasa.
	EN28	Presentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori.
-Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan.
-Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja.
-Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis.
-Asesmen Pemasok Atas Lingkungan	EN32	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan.
	EN33	Dampak lingkungan negative signifikan actual dan potensi dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
KATEGORI SOSIAL		
SUB-KATEGORI : PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
-Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat pengkrekutan karyawan baru, dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah.
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
	LA3	Tingkat kembali berkerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender.
-Hubungan Industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama.
-Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA5	Presentase total kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja.
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender.
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka.
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja.

-Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan.
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti.
	LA11	Presentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara regular, menurut gender dan kategori karyawan.
-Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indicator keberagaman lainnya.
	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan berdasarkan lokasi operasional yang signifikan.
-Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria prakti ketenagakerjaan.
	LA15	Dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani.
B-KATEGORI : HAK ASASI MANUSIA		
-Investasi	HR1	Jumlah total dan presentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia.
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk presentase karyawan yang dilatih.
-Non Diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil.
-Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
-Pekerja Anak	HR5	Operasi dan pemasok yang teridentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja
		anak dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
-Pekerja Paksa Atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang teridentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau

		wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.
-Praktik Pengamanan	HR7	Presentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi.
-Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil.
-Asesmen	HR9	Jumlah total dan presentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia.
-Asesmen Pemasok Atas Hak Asasi Manusia	HR10	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.
	HR11	Dampak negatif actual potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
-Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
B-KATEGORI MASYARAKAT		
-Masyarakat Lokal	SO1	Presentase operasi dengan pelibatan masyarakat local, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan.
	SO2	Operasi dengan dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat local.
-Anti Korupsi	SO3	Jumlah total dan presentase operasi yang dinilai terhadap resiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi.
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi.
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.
-Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat.
-Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya.
-Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan.

-Asesmen Pemasok	SO9	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kreteria untuk dampak terhadap masyarakat.
-Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO10	Dampak negatif actual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
-Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, di tangani, dan diselesaikan malalui mekanisme pengaduan resmi.
B-KATEGORI : TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK		
-Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Presentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan.
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil.
-Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta presentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis.
	PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil.
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan.
-Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan.
	PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi dan sponsor, menurut jenis hasil.
-Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
-Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.

Sumber : *Global Reporting Initiative*

Item-item pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tersebut diukur dengan menggunakan CSR Index, yang diungkapkan dalam *Global Reporting Initiative (GRI)* dengan rumus sebagai berikut :

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan :

CSR_i : *Corporate Social Responsibility Index* perusahaan j X_{ij} : 1=jika kriteria diungkapkan; 0= jika kriteria tidak diungkapkan n_j : Jumlah kriteria pengungkapan *Corporate Social Responsibility* untuk perusahaan j, n_j ≤

2.1.7 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

2.1.7.1 Definisi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Gusti Maya Sari (2014) mengemukakan *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu Negara.

Menurut Pohan (2013:23) pengertian penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan- kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Sedangkan menurut Suandy (2011:7) Penghindaran Pajak atau *tax avoidance* adalah:

“Rekayasa (*tax affairs*) yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran Pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di Undang- undang dan berada dalam jiwa dari Undang undang tetapi berlawanan dengan jiwa Undang-undang.”

Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa Penghindaran Pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang atau aturan lain yang berlaku. *Tax avoidance* diukur menggunakan *CETR* yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Pradnyadari (2015) mendefinisikan agresivitas pajak penghasilan badan (sering disebut juga sebagai penghindaran pajak) sebagai tingkat yang paling akhir dan spektrum serangkaian perilaku perencanaan pajak Zuber (2007) dalam Pradnyadari (2015) Menyatakan:

“Between tax avoidance and tax evasion, there exist potential gray area of aggressiveness. This gray area exists because there are tax shelters beyond what is specifically allowed by the tax law and the tax law does not specifically address all possible tax transaction. A bright line does not exist between tax avoidance and tax evasion because neither term adequately describes all transactions. Therefore, aggressive transactions and decision-making may potentially become either tax avoidance or tax evasion issues”.

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi dan pengambilan keputusan yang agresif mungkin secara potensial dapat menjadi masalah penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal yang tidak melanggar hukum perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Dalam arti lain, perusahaan sengaja melakukan penghindaran pajak untuk memperkecil pembayaran yang harus dibayarkan kepada Negara, dengan dilakukannya penghindaran pajak akan dapat meningkatkan *cash flow* perusahaan.

2.1.7.2 Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Menurut Sumarsan (2012:118) Penghindaran Pajak dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Menahan diri
Yang dimaksud menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh: tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan barang mewah, tidak mengkonsumsi minuman keras (alkohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.
2. Lokasi terpencil
Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh: di Indonesia, diberikan keringanan bagi *investor* yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.

Sedangkan menurut Siahaan (2010) dalam Prakoso (2014), ada tiga tahapan atau langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan yaitu:

1. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun illegal.
2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun illegal
3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak atau membayar pajak tersebut.

Menurut Komite urusan fiskal dari *organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2011:7) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, maksudnya adalah berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari Undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan hal tersebut yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara yang dilakukan untuk aktivitas penghindaran pajak.

2.1.7.3 Metode Pengukuran Tax Avoidance

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Atsil (2015) saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang atau aturan lain yang berlaku. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan CETR yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Tax Avoidance dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala nominal, yaitu 1 melakukan penghindaran pajak dan 0 tidak melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila *cash effective tax rate* (CETR) kurang dari 25%, dan apabila *cash effective tax rate* (CETR) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012).

Pengukuran Tax Avoidance menggunakan CETR menurut Dyreng, et. al (2008) dalam Simarmata (2014), baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan CETR dapat menjawab atas permasalahan dan

keterbatasan atas pengukuran tax avoidance berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai CETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

Tabel 2.2 Pengukuran Penghindaran Pajak

Pengukuran	Cara Menghitung	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total expense per dollar of pre-tax income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings over years
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR an firm`s GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{pre-tax book icome} = a + b \times \text{control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - (\text{U.S CTE} - \text{fgn CTE}) / \text{U.S.STR} - (\text{ - } -1)$	The total difference between book and taxable income
Temporary BTD	Deffered tax expense/U.S STR	The total difference between book and taxable income
Abnormal total BTD	Residual from BTD/ + mi	A measure of unexplained total book-tax difference
Unrecognized tax benefefits	Disclosed amount post-FIN 48	Tax liability accrued for taxes

		<i>not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator Variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber : Harlon dan Heitzman (2010) dalam Atsi (2015)

2.1.7.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis ini mengacu kepada beberapa penelitian sebelumnya. Pada umumnya kajian yang dilakukan oleh peneliti- peneliti tersebut telah dipublikasikan pada beberapa jurnal ilmiah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Suyanto (2012)	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Menggunakan variabel independen yaitu <i>Leverage</i> dan Variabel dependen yaitu <i>tax avoidance</i>	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Profitabilitas	Pada penelitian <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
2	Annisa (2012)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance	Menggunakan variabel independen yaitu profitabilitas, <i>leverage</i> dan variabel dependen Tax	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel corporate governance	Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, corporate governance

			avoidance		berpengaruh terhadap tax avoidance
3	Kurniasih dan Sari (2013)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran perusahaan dan Corporate governance terhadap Tax Avoidance	Menggunakan variabel independen yaitu profitabilitas, leverage, dan variabel dependen tax avoidance	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel ukuran perusahaan dan corporate governance	Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance Leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance Corporate governance tidak berpengaruh terhadap tax avoidance Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance
4	I Gusti Cahya Maharani dan ketut Alit Suardana (2014)	Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance	Menggunakan variabel independen yaitu profitabilitas, leverage, dan variabel dependen tax avoidance	-	Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance
5	I Gede Hendry Darmawan dan I Made Sukartha (2014)	Pengaruh Leverage, Corporate governance dan Ukuran perusahaan terhadap Tax Avoidance	Menggunakan variabel independen yaitu leverage, dan variabel dependen tax avoidance	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel ukuran perusahaan dan corporate governance	Leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance - Corporate governance berpengaruh terhadap tax avoidance Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance
6	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2014)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Umur perusahaan terhadap Tax avoidance	Menggunakan variabel independen yaitu profitabilitas, leverage, dan variabel	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel umur perusahaan	Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance Leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance

			dependen tax avoidance		Umur perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance
7	Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016)	Pengaruh Leverage dan Corporate Governance terhadap Tax avoidance	Menggunakan variabel independen yaitu leverage, dan variabel dependen tax avoidance	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Corporate governance	- Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance - Corporate governance berpengaruh terhadap tax avoidance
8	Rezka Olva (2016)	Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax avoidance	Menggunakan variabel independen yaitu Profitabilitas, dan variabel dependen tax avoidance	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Ukuran perusahaan	- Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Desi Mandasari (2014), yaitu “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility terhadap *Tax Avoidance*” pada Perusahaan batubara Sub Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada waktu, perusahaan dan sampel penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan batubara sub otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan batubara subsektor batubara yang terdaftar di BEI tahun 2015- 2019

Alasan peneliti memilih perusahaan batubara subsektor batubara yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu Alasan peneliti menggunakan Subsubsektor batubara batu bara karena memberikan kontribusi yang besar untuk penerimaan negara dalam subsektor perpajakan sehingga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kecurangan dalam pembayaran pajak yang mengakibatkan kerugian negara. Perusahaan-perusahaan batubara Indonesia dianggap memiliki keunggulan kompetitif untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan yang relatif tinggi. Oleh karenanya menarik untuk dikaji, perusahaan-perusahaan batubara Indonesia memiliki keunggulan kompetitif di pasar global, sebab Indonesia masuk kedalam jajaran produsen terbesar dunia untuk beberapa komoditas tambang. Indonesia juga dinilai sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat menjanjikan. Posisi Indonesia dalam hal potensi sumber daya komoditas batubara, mengalahkan Peru, Australia, Mexico, dan Afrika Selatan. (www.ekonomi.inilah.com).

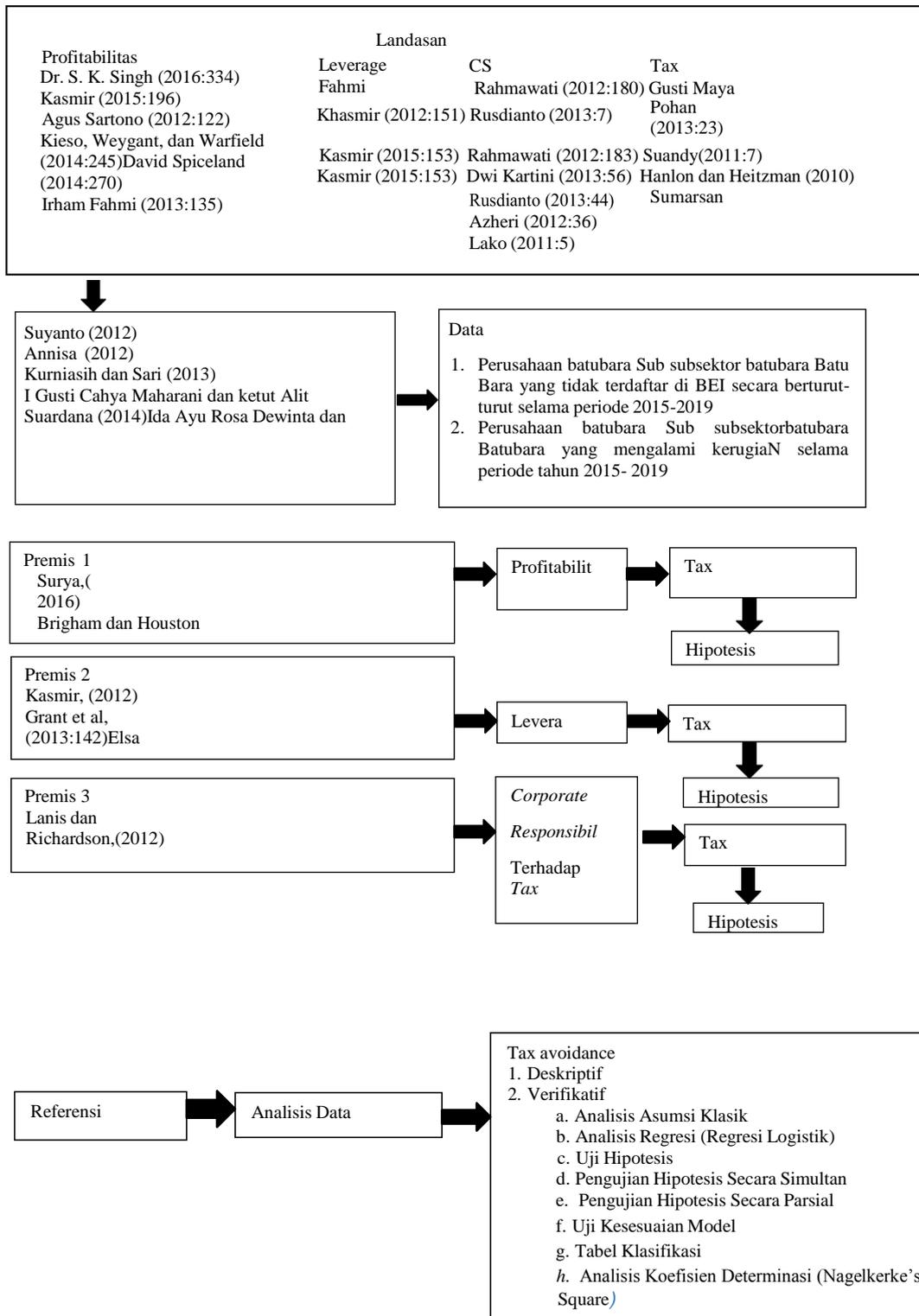
2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1. Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan sedangkan pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Hendy dan Sukartha, 2014). Hal tersebut dapat menimbulkan upaya perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak maupun

penghindaran pajak.

Pohan (2013:23) *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas dan *leverage*, terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian secara keseluruhan

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Asset (ROA). Pada penelitian ini *Return On Asset* (ROA) digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan.

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) mengemukakan bahwa:

“Return On Asset (ROA) mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik dengan profitabilitas yang tinggi maka semakin tinggi kesempatan melakukan perencanaan pajak.”

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Chen *et.al* (2010) sebagai berikut:

“Firms with high profitability have the opportunity to position themselves in tax planning that reduces the amount of taxes.”

Adapun hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) sebagai berikut:

*“Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya.”*

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018) menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang menunjukkan bahwa:

“*Return on Assets (ROA)* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) juga menyatakan bahwa Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik salah satunya dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi, serta beban penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya serta memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terindikasi melakukan penghindaran pajak”.

2.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula dan munculnya biaya bunga, biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Surya, 2016).

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Brigham dan Houston (2014:155) menyatakan bahwa:

“Leverage ratio is the ratio that measures the extent to which the firm's financial leverage must pay a fixed expense in the form of interest expense.”

Adapun hubungan *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Nurfadilah (2014) sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki nilai dari rasio *leverage* tinggi, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.”
Hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh

Christine Harrington *et. al* (2013) sebagai berikut:

“In the context of the dynamic trade leverage following a refinancing

event, These results support the no avoiders value leverage as part of an overall tax avoidance strategy, and are robust to alternative definitions of leverage, methods of refinancing event.”

Selain itu hubungan leverage dan tax avoidance Darmawan dan Sukartha, (2014) menyatakan bahwa :

“Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar”.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Surya dan Putu (2016) Calvin dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa:

“*Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai dari rasio *Leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut”.

2.2.3 Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance

Pajak merupakan salah satu bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada stakeholder melalui pemerintah. Perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012).

Adapun hubungan *Corporate Social Responsibility* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Shintya Dewi Adi Putri (2015) mengemukakan bahwa:

“Semakin tinggi tingkat pengungkapan *CSR* yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan. Sedangkan semakin rendah tingkat pengungkapan *CSR* suatu perusahaan maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan *tax avoidance*”.

Selain itu hubungan *corporate social responsibility* dengan *tax avoidance* dinyatakan oleh Watson (2011):

“Perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategipajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab lebih agresif dalam menghindaripajak”.

Watson (2011), Lanis dan Richardson (2012) dalam Nyoman Budhi Setya

Dharma dan Naniek Noviani (2017) yang menemukan bahwa :

“Semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Penghindaran pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan, karena salah satu tanggung jawab perusahaan adalah dimulai dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak pemerintah (Landolf , 2006)”.

Grey et, al (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007) menyebutkan bahwa:

“Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan stakeholders, dukungan tersebut harus dicari oleh perusahaan. Dukungan tersebut dapat dicari melalui kegiatan atau aktifitas perusahaan sehari-hari. Pengungkapan CSR dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menjalin hubungan dengan stakeholders- nya, sehingga semakin luas pengungkapan CSR tersebut maka akan semakin baik dukungan dari stakeholders. Dukungan yang baik dari stakeholders kepada perusahaan akan membuat perusahaan semakin berkembang dan sustainable”.

Mengutip dari Ang Swat Lin Lindawati dan Marsella Eka Puspita(2015):

“Pengungkapan CSR menjadi sinyal yang diberikan pihak manajemen kepada seluruh stakeholder termasuk calon investor mengenai prospek perusahaan di masa depan serta menunjukkan nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan atas kepeduliannya terhadap dampak ekonomi, social dan lingkungan yang timbul dari aktivitas perusahaan tersebut. Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat menyebabkan pergeseran legitimasi (Lindblom 1994) dan perusahaan dituntut untuk peka dan mampu menyesuaikan perubahan tersebut sehingga keberlanjutan perusahaan akan terjamin”.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis menetapkan hipotesis

penelitian sebagai berikut.

H1: Terdapat pengaruh positif Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

H2: Terdapat pengaruh negatif *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

H3: Terdapat pengaruh positif *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang dirancang melalui langkah-langkah penelitian dari mulai operasional variabel, penentuan jenis dan sumber data, model penelitian dan diakhiri dengan merancang analisis data dan pengujian hipotesis.

Menurut Sugiyono (2017:2) metode penelitian adalah:

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungan serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, mengenai fakta-fakta hubungannya antara variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2017:8), metode penelitian kuantitatif adalah:

"Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2017:35) adalah:

"Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain."

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan

variabel-variabel Profitabilitas, *Leverage*, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan batubara Subsubsektor batubara Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015-2019.

Menurut Moch. Nazir (2014:91) metode verifikatif adalah:

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas (hubungan sebab-akibat) antara variabel melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis diterima atau ditolak”.

Penelitian dengan pendekatan verifikatif ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan batubara Subsubsektor batubara Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015-2019.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang diteliti dan dianalisis. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu profitabilitas, *leverage*, pengungkapan *corporate social responsibility* dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan batubara Subsubsektor batubara Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015-2019.

3.3 Unit Penelitian

Unit penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan. Perusahaan yang menjadi unit penelitian ini adalah perusahaan batubara Subsubsektor batubara Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015-2019. Peneliti melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan dalam situs www.idx.co.id.

3.4 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Variabel Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa variable yang ditetapkan dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data.

Menurut Sugiyono (2017:39) pengertian variabel penelitian adalah:

“Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*. Penulis mengelompokkan variabel-variabel dalam judul tersebut dalam 2 (dua) variabel yaitu:

1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2015:64) bahwa:

“Variabel independen (X) variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) variabel Independen yang diteliti diantaranya:

a. Profitabilitas (X_1)

Menurut Mamduh M. Hanafi (2012:81) rasio profitabilitas adalah:

“Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham yang tertentu”.

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator Mamduh M. Hanafi (2012:81) yaitu:

Return On Asset (ROA) :

b. *Leverage (X₂)*

Menurut Irham Fahmi (2013:132) menyatakan bahwa:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan di biayai dengan utang”.

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah Irham Fahmi (2013:132) yaitu:

Debt to Equity Ratio : $\frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$

c. *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (X₃)*

Menurut Rahmawati (2012:183) menyatakan bahwa:

“Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure, corporate social reporting, social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan”.

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini

adalah Rahmawati (2012:183) yaitu:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

2. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2015:64) bahwa:

“Variabel Dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

Menurut Dyreng, et al 2010 *tax avoidance* adalah :

“Tax Avoidance is any form of activity that gives effect to the tax obligation, whether activities are allowed by tax or special activities that reduce taxes. Tax avoidance is usually done by exploiting the weaknesses of the tax law and not violate the tax law.”

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini

adalah Dyreng, et al 2010 yaitu:

$$CETR : \frac{\text{cash tax paid}}{\text{net income before tax}}$$

3.4.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, proses ini juga dimaksud untuk menentukan skala pengukuran dari masing- masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistika dapat dilakukan secara benar. Berikut adalah operasionalisasi variabel dalam penelitian ini:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel Independen Profitabilitas (X1)

Konsep Variabel	Indikator	Skala
“Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham yang tertentu”. (Mamduh M.Hanafi, 2012:81)	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	Rasio

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel Independen Leverage(X₂)

Konsep Variabel	Indikator	Skala
<p>“Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan di biayai dengan utang”.</p> <p>(Irham Fahmi, 2013:132)</p>	$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$	Rasio

Tabel 3.3
Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel Independen Pengungkapan Corporate Social Responsibility (X₃)

Konsep Variabel	Indikator	Skala
<p>“Pengungkapan tanggung jawab social perusahaan yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, social accounting, atau corporate social responsibility merupakan proses pengkomunikasian dampak social dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan”.</p> <p>(Rahmawati, 2012:183)</p>	$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>CSRI_j : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j</p> <p>n_j : Jumlah item untuk perusahaan j, n_j = 91 (Skor maksimal)</p> <p>∑ X_{ij} : Jumlah total pengungkapan CSR oleh perusahaan.</p> <p>1 = jika item diungkapkan; 0= jika item tidak diungkapkan. Dengan demikian, 0 < CSRI_j < 1</p>	Rasio

Tabel 3.4
Operasionalisasi Variabel Penelitian dan Variabel Dependen

Konsep Variabel	Indikator	Skala
<p><i>“Tax Avoidance is any form of activity that gives effect to the tax obligation, wether activities are allowed by tax or special activities that reduce taxes. Tax avoidance is usually done by exploiting the weaknesses of the tax law and not violate the tax law”.</i> (Dyrenge et, al. 2010)</p>	$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Income Before Tax}}$ <p>Jika CETR < 25% : diberi score 1: Melakukan <i>tax avoidance</i></p> <p>Jika CETR > 25% : diberi score 0: Tidak melakukan <i>tax avoidance</i></p>	Nominal

3.4.3 Model Penelitian

Model penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang penulis kemukakan yaitu Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*, maka model penelitian ini dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut.

Keterangan:

= Pengaruh Parsial

Gambar 3.1 Model Penelitian

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah sebagai berikut:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada perusahaan batubara sub subsektor batubara batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Berikut ini merupakan daftar perusahaan batubara sub subsektor batubara batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 3.5
Daftar Perusahaan batubara Sub subsektor Batubara

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
1	ADRO	Adaro Energy Tbk	16 Juli 2008
2	ARII	Atlas Resources Tbk	8 November 2011
3	ATOK	Bara Jaya International Tbk.	17 April 2002
4	BORN	Borneo Lumbung Energy & Metal Tbk	26 November 2010
5	BRAU	Berau Coal Energy Tbk	19 Agustus 2010
6	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk	8 November 2012
7	BUMI	Bumi Resources Tbk	30 Juli 1990
8	BYAN	Bayan Resources Tbk	12 Agustus 2008
9	DEWA	Darma Henwa Tbk	26 September 2007
10	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk	15 juni 2001
11	FIRE	Alfa Energy Investama Tbk	9 Juni 2017
12	GEMS	Golden Energy Mines Tbk	17 November 2011
13	GTBO	Garda Tujuh buana Tbk	9 Juli 2009
14	HRUM	Harum Energy Tbk	6 Oktober 2010
15	ITMG	Indo Tambang raya Tbk	18 Desember 2007
16	KKGI	Resources Alam Indonesia Tbk	1 Juli 1991
17	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	10 Juli 2014
18	MYOH	Samindo Resources Tbk	27 Juli 2000
19	PKPK	Perdana Karya Perkasa Tbk	11 Juli 2007
20	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	23 Desember 2002

21	PTRO	Petrosea Tbk	31 Mei 1990
22	SMMT	Golden Eagle energy Tbk	29 Februari 2000
23	TKGA	Permata Prima Sakti Tbk	06 Januari 1992
24	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk	6 Juli 2012

(Sumber: www.idx.co.id data diolah)

3.5.2 Teknik Sampling dan Sampel

3.5.2.1 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2017:81) mengemukakan teknik sampling adalah sebagai berikut:

"Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan."

Menurut Sugiyono (2017: 82) *Probability Sampling* dapat didefinisikan sebagai berikut:

"*Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel."

Non-Probability Sampling menurut Sugiyono (2017:84) adalah sebagai berikut:

"*Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel."

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dengan menggunakan penelitian *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2017:85), *purposive sampling* adalah sebagai berikut: "*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu".

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sample penelitian yaitu:

1. Perusahaan batubara Subsubsektor batubara Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
2. Perusahaan batubara Subsubsektor batubara Batu Bara yang tidak Delisting dari Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
3. Perusahaan batubara Subsubsektor batubara Batu Bara yang tidak mengalami rugi pada tahun 2015-2019.

Berikut adalah hasil perhitungan sampel yang menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria di atas, yaitu :

Tabel 3.6 Perhitungan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan batubara Subsubsektor batubara Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019	21
2	Dikurangi : Perusahaan batubara Subsubsektor batubara Batu Bara yang delisting dari Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019	(2)
3	Dikurangi : Perusahaan batubara Subsubsektor batubara Batu Bara yang	(11)

	pernah mengalami rugi pada tahun 2015-2019	
Total sampel		8

Sumber: www.idx.co.id (data diolah)

Berdasarkan kriteria pada tabel yang dihasilkan 8 perusahaan sebagai sampel penelitian. Berikut ini nama-nama Perusahaan batubara Subsubsektor batubara Batu Bara yang telah memenuhi kriteria dan terpilih menjadi sampel penelitian berdasarkan *Purposive Sampling* yang digunakan :

Tabel 3.7
Daftar Perusahaan yang menjadi sampel penelitian

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk
3	GEMS	Golden Energy Mines Tbk
4	ITMG	Indo Tambang Raya Tbk
5	KKGI	Resources Alam Indonesia Tbk
6	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk
7	MYOH	Samindo Resources Tbk
8	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk

Sumber : www.idx.co.id

3.5.2.2 Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, sampel yang terpilih adalah perusahaan batubara sub subsektor batubara batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara berturut-turut memiliki kriteria tertentu yang mendukung penelitian.

Menurut Sugiyono (2017:81), sampel adalah sebagai berikut :

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu".

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:223). Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Reseach*)

Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memperoleh berbagai informasi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan sebagai dasar teori dan acuan dalam mengolah data, dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan mengkaji literatur-literatur beberapa buku-buku, jurnal, makalah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga berusaha mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah data sekunder yang berhubungan dengan objek yang akan penulis teliti.

2. Riset Internet (*Online Resarch*)

Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memperoleh berbagai data dan informasi tambahan dari informasi tambahan dari situs-situs yang berhubungan dengan penelitian.

3.6.1 Sumber Data

Dalam Prosedur pengumpulan data ada dua sumber data yaitu primer dan sekunder.

Data Primer Menurut Sugiyono (2015:137) : “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Menurut Sugiyono (2017:137) menjelaskan data sekunder sebagai berikut:

“Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian”.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id dan www.sahamok.com, data yang dimaksud meliputi laporan keuangan laba rugi dan neraca. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series*. Data bersifat *time series* karena data dalam penelitian ini adalah data dalam interval waktu tertentu, dalam penelitian ini yaitu tahun 2015-2019.

3.7 Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh profitabilitas, *leverage* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Menurut Sugiyono (2016:147) analisis data adalah:

“Kegiatan setelah data dari seluruh responden atau data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah; mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk hipotesis yang diajukan”.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif dan verifikatif.

3.7.1 Rancangan Awal

3.7.1.1 Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2017:35) adalah:

"Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain."

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas

- a. Menentukan laba setelah pajak pada perusahaan, data ini diperoleh dari laporan keuangan laba rugi.
- b. Menentukan total aset dari setiap perusahaan, data ini diperoleh dari laporan posisi keuangan/neraca.
- c. Menentukan profitabilitas dengan rumus ROA yaitu dengan cara membagi laba setelah pajak dengan total *assets*.
- d. Menetapkan kriteria kesimpulan dengan cara membuat 5 kelompok kriteria: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangatteringgi.
- e. Menentukan nilai maksimum dan nilai minimum.
- f. Menentukan *range* (jarak interval) =
- g. Membuat data tabel frekuensi nilai perubahan untuk setiap variabel penelitian:
- h. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil penghitungan yangdiperoleh.

Tabel 3.8
Kriteria Penilaian Profitabilitas

Interval			Kriteria
0,41	-	8,21	Sangat Rendah
8,22	-	16,01	Rendah
16,02	-	23,81	Sedang
23,82	-	31,61	Tinggi
31,62	-	39,41	Sangat Tinggi

2. *Leverage*

- a. Menentukan *total liability* pada perusahaan , data ini diperoleh dari laporan posisi keuangan/neraca.
- b. Menentukan *total asset*, data ini diperoleh dari laporan posisi keuangan/neraca.
- c. Menentukan *leverage* dengan rumus DAR yaitu dengan cara membagi *total liability* dengan *total asset*.
- d. Menetapkan kriteria kesimpulan dengan cara membuat 5 kelompok kriteria: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi.
- e. Menentukan nilai maksimum dan nilai minimum.
- f. Menentukan *range* (jarak interval) =
- g. Membuat data tabel frekuensi nilai perubahan untuk setiap variabel penelitian:
- h. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil penghitungan yang diperoleh.
- i. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil penghitungan yang diperoleh.

Tabel 3.9
Kriteria Penilaian *Leverage*

Interval			Kriteria
19,94	-	41,61	Sangat Rendah
41,62	-	66,27	Rendah
66,28	-	90,94	Sedang
90,95	-	115,60	Tinggi
115,61	-	140,27	Sangat Tinggi

3. Pengungkapan *corporate social responsibility*

Untuk dapat melihat penilaian atas variabel tersebut, dapat dibuat tabel distribusi seperti di bawah ini. Adapun langkah- langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan periode pengamatan, data ini diperoleh dari laporan tahunan.
- b. Menghitung item-item pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, nilai untuk item-item yang digunakan 1 dan yang tidak diungkapkan 0.
- c. Menghitung jumlah item dengan cara menjumlahkan seluruh item yang telah diberi nilai 1
- d. Menghitung rata-rata indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan cara membagi 91 item dari hasil penjumlahan item yang diungkapkan.
- e. Menghitung *Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI)* dengan cara menghitung rata-rata indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dikali 100.
- f. Dengan diperolehnya CSRDI maka dapat menentukan perusahaan

kedalam kriteria penelitian.

Tabel 3.10
Kriteria Penilaian Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Interval	Kategori Pengungkapan CSR
0%-20,00%	Sangat Rendah
20,01%-40,00%	Rendah
40,01-60,00%	Sedang
60,01%-80,00%	Tinggi
80,01%-100%	Sangat Tinggi

Sumber : *Global Reporting Initiative (GRI)*.

g. Menarik kesimpulan

4. Tax Avoidance

- a. Menentukan jumlah pembayaran pajak.
- b. Menentukan jumlah laba sebelum pajak.
- c. Membagi jumlah pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan dengan jumlah labasebelum pajak.
- d. Menentukan kriteria *tax avoidance*. Menurut Budiman dan Setiyono (2012) perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila CETR perusahaan kurang dari 25%.
- e. Membuat data tabel frekuensi nilai perubahan untuk setiap variabel penelitian.
- f. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil penghitungan yang diperoleh.

Tabel 3.11
Kriteria Penilaian *Tax Avoidance*

Nilai CETR	Kriteria	Skor
<i>CETR</i> < 25%	Melakukan penghindaran Pajak	1
<i>CETR</i> > 25%	Tidak melakukan penghindaran pajak	0

Sumber : Budiman dan Setiyono (2012)

3.7.1.2 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini analisis verifikatif digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh profitabilitas, *leverage* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *Tax avoidance*.

Pengertian penelitian analisis verifikatif yang diutarakan juga oleh Sugiyono (2017:37) yaitu:

“Metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.”

3.7.1.3 Analisis Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kualitas data sehingga datadiketahui keabsahannya dan menghindari terjadinya estimasi bias. Pada regresi logistik pengujian asumsi klasik hanya uji multikolinearitas. Menurut Danang Sunyoto (2013:87) menjelaskan uji multikolinearitas sebagai berikut:

"Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independen variabel ($X_1, 2, \dots, n$) di mana akan di ukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r)".

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Indikator model regresi yang baik adalah tidak adanya korelasi di antara variabel independen (Imam Ghazali, 2013:105). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Menurut Imam Ghazali (2013:105) menyatakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. "Jika R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
3. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari: a) *tolerance value* dan lawanya b) *Variance Inflation Faktor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/tolerance$). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:
 - *Tolerance value* < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolinearitas.

- *Tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinearitas".

3.7.1.4 Analisis Regresi (Regresi Logistik)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model regresi logistic. Alasan penggunaan regresi logistic karena regresi logistic cocok digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal (moninal atau nonmetric). Menurut Ghozali (2013:333) *logistic regression* digunakan untuk menguji apakah terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen.

Regresi logistic digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel profitabilitas, *leverage* dan pengungkapan *corporate social responsibility* mempengaruhi *tax avoidance*.

Menurut Suharjo (2013:153), model regresi logistic yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

Dimana :

$\ln (Tax Avoidance$

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi

X_1 = Profitabilitas

X_2 = *Leverage*

X_3 = Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

3.7.2 Rancangan Uji

3.7.2.1 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji kebenarannya dalam suatu penelitian.

Menurut Sugiyono (2014:63), menyatakan bahwa:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel, dalam hal ini adalah Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* menggunakan perhitungan statistik. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3.7.2.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara bersama-sama (overall) di dalam model, dapat digunakan Uji 2LogLikelihood. Misalkan $Y_1, Y_2, Y_3, \dots, Y_T$ adalah variabel random yang saling bebas sebanyak T , masing-masing memiliki fungsi distribusi probabilitas $f(Y_t; 1, 2, 3, \dots, p)$ dengan $t = 1, 2, 3, \dots, T$. Himpunan yang terdiri dari semua parameter titik $(1, 2, 3, \dots, p)$ dinotasikan dengan θ . Hipotesis uji ini adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ Tidak ada pengaruh profitabilitas,

leverage, dan pengungkapan *corporate social responsibility* secara simultan terhadap *tax avoidance*

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ Terdapat pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pengungkapan *corporate social responsibility* secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan:

l_0 = nilai maksimum likelihood tanpa variabel prediktor tertentu.

l_1 = nilai maksimum likelihood dengan variabel prediktor tertentu.

Nilai *chi-square* yang digunakan dalam regresi logistik adalah selisih antara $-2 \log \text{Likelihood}$ yang sebelum variabel independen masuk ke dalam model dan $-2 \log \text{likelihood}$ yang setelah variabel dependen masuk ke dalam model.

H_0 ditolak jika *p-value* (0,05) yang berarti ada salah satu atau lebih yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. H_0 ditolak jika *p-value* (0,05) yang berarti ada salah satu atau lebih yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon.

3.7.2.3 Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Pada umumnya Uji parsial ini digunakan setelah uji signifikansi model memutuskan bahwa minimal ada satu variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tujuannya adalah untuk mencari tahu manakah variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen

tersebut.

Menurut Widarjono (2010:123) dalam regresi logistik uji Wald digunakan untuk menguji apakah ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan cara membandingkan nilai statistik Wald dengan nilai pembanding *Chi-Square* pada derajat bebas (db) = 1 pada alpha 5%, atau dengan membandingkan nilai signifikansi probabilitas (*p-value*) dengan alpha sebesar 5% dimana *p-value* yang lebih kecil dari alpha menunjukkan bahwa hipotesis diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Menurut Field (dalam Khasanudin, 2011) uji *Wald test* Hosmer dan Lameshow dengan hipotesis seperti dibawah ini.

statistik),

$j= 1, 2, 3, \dots, p$ Perhitungan statistik uji *Wald* adalah sebagai berikut:

Keterangan:

= penaksir parameter

() = penduga *standar error* dari

P = banyaknya variabel predictor

H_0 ditolak jika nilai statistik uji Wald $Z_{j/2}$ dan jika *p-value* (0,05) yang

berarti berpengaruh signifikan terhadap variable respon.

3.7.2.4 Uji Kesesuaian Model

Uji kesesuaian model digunakan uji statistik *Goodness of Fit (ChiSquare X^2)*.

Uji statistik *Chi Square* dapat diformulasikan sebagai berikut:

- a. Pearson X^2 dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Keterangan:

= Jumlah variabel respon pada grup ke- k
 probabilitas

M_j = banyaknya observasi yang memiliki nilai

' = banyaknya observasi pada grup ke- k

Uji statistik ini digunakan untuk menguji hipotesisi sebagai berikut:

H_0 diterima = model sesuai (tidak ada perbedaan yang nyata antara hasil observasi dengan kemungkinan hasil prediksi model)

H_1 diterima = model tidak sesuai (ada perbedaan yang nyata antara hasil observasi dengan kemungkinan hasil prediksi model)

Semakin besar nilai Pearson X^2 mengindikasikan model kurang baik karena terdapat perbedaan besar antara observasi yang diamati dengan yang diprediksi. Sebaliknya semakin kecil nilai Pearson X^2 mengindikasikan model baik karena perbedaan besar antara observasi yang diamati dengan yang diprediksi adalah kecil.

- b. Deviance X^2

Nilai Deviance X^2 ini dihitung dari perbedaan $-2LL$ antara model dengan

saturated model. *Saturated model* adalah model dengan memasukkan interaksi antara variabel independen. Jika perbedaan keduanya kecil model adalah baik (*well fit*) dan sebaliknya jika perbedaan keduanya besar maka model kurang baik.

Jika nilai signifikansi kedua tes ini lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan model mampu menjelaskan data dengan baik (Widarjono, 2010:156).

3.7.2.5 Tabel Klasifikasi

Tabel klasifikasi menunjukkan/menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen, sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya pada variabel dependen. Pada model yang sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100%. Jika model logistic mempunyai homokedastisitas, maka presentase yang benar akan sama untuk kedua baris (Ghozali, 2016:329).

3.7.2.6 Analisis Koefisien Determinasi (*Nagelkerke's R Square*)

Koefisien *Nagelkerke's R Square* merupakan nilai yang menunjukkan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien *Nagelkerke's R Square* dapat diinterpretasikan hampir mirip seperti nilai R square dalam model regresi linier, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Menurut Sugiyono (2015:257) menyatakan bahwa:

“Koefisien determinasi diperoleh dari koefisien korelasi pangkat 2, sebagai

berikut: $KD = R^{2\%}$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

R^2 = Koefisien korelasi yang dikuadratkan.